
**EFEKTIVITAS PROGRAM TRANSMIGRASI
DALAM MENGATASI KEMISKINAN:
STUDI KASUS RASAU JAYA (1971-1980)**

*THE EFFECTIVENESS OF TRANSMIGRATION
PROGRAMMES IN OVERCOMING POVERTY:
RASAU JAYA CASE STUDY (1971-1980)*

Reyhan Ainun Yafi

SMAN 1 Rasau Jaya

Jln. Pendidikan No. 6 Rasau Jaya, Kalimantan Barat, Indonesia

reyainunyafi@gmail.com

Adi Setiawan

Universitas Gadjah Mada

Jln. Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

adislainawa@gmail.com

Diterima tanggal 21 Desember 2023

Disetujui tanggal 12 Desember 2024

ABSTRACT

This article looks into the transmigration programme in Rasau Jaya from 1971 to 1980, focusing on the circumstances and socio-economic challenges that transmigrants dealt with. Transmigration was one of the New Order government programmes to address the overcrowding and poverty issues. This research aims to analyse how effectively the transmigration program in Rasau Jaya can address the issue of poverty. The study adopted the historical method, utilising various sources such as documents from Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Penelitian dan Persiapan, Direktorat Jenderal Transmigrasi, newspapers and some other relevant literature. This article highlights the poverty experienced by transmigrants, a topic often overlooked in previous studies. The findings suggest that the transmigration program in Rasau Jaya has fallen short of its goal of alleviating poverty. Three main factors contribute to this shortfall, including inadequate government preparation, the basic skills of the transmigrants, and the ecological conditions prevalent in the Rasau Jaya area. As a result, transmigrants in Rasau Jaya are compelled to seek employment outside of agriculture, taking on roles as construction workers or timber workers and even as homeless individuals doing various odd jobs.

Keywords: *transmigration, New Order, Rasau Jaya, and poverty.*

ABSTRAK

Artikel ini menguraikan pelaksanaan program transmigrasi di Rasau Jaya sejak 1971 hingga 1980, dengan berfokus pada keadaan serta tantangan sosial-ekonomi yang dialami oleh para transmigran. Transmigrasi merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa pelaksanaan program transmigrasi di Rasau Jaya dapat mengatasi masalah kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Sumber yang digunakan adalah dokumen-dokumen koleksi Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Penelitian dan Persiapan, Direktorat Jenderal Transmigrasi, surat kabar, dan beberapa literatur lain yang relevan. Salah satu kontribusi utama artikel ini adalah penekanan pada isu kemiskinan yang dialami oleh transmigran, aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program transmigrasi di Rasau Jaya tidak sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya dalam misi pengentasan kemiskinan. Setidaknya, terdapat tiga faktor yang menentukan capaian itu, yakni kesiapan pemerintah, keterampilan dasar transmigran, serta kondisi ekologis di daerah Rasau Jaya. Karena ketidakberhasilan tersebut, transmigran di Rasau Jaya terpaksa mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, misalnya menjadi buruh bangunan atau buruh kayu, bahkan bekerja serabutan sebagai tuna wisma.

Kata kunci: transmigrasi, Orde Baru, Rasau Jaya, dan kemiskinan.

A. PENDAHULUAN

Pemerataan penduduk dan kesejahteraan masyarakat telah lama menjadi persoalan di Indonesia. Jumlah populasi yang besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa yang membuat daerah ini menjadi padat penduduk. Kondisi ini menimbulkan permasalahan sebab lonjakan demografi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai.

Sebuah survei tahun 1902 yang dilakukan oleh Menteri Urusan Jajahan, A.W.F. Idenburg, menemukan bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa telah meningkat sebesar 45% dengan pertumbuhan penduduk lebih kurang 25.200.000 jiwa selama 20 tahun terakhir, sedangkan persawahan hanya meningkat sebesar 23%. Hal ini

berimbas pada penurunan pendapatan rata-rata setiap individu (Manay 2016). Peningkatan penduduk di Pulau Jawa cenderung bertahan dari masa ke masa, sebagaimana tampak pada data yang disampaikan oleh MacAndrews (1978:459), bahwa “pada 1975, wilayah Jawa dengan 6,1% dari total luas daratan Indonesia menampung 63,3% dari total populasi negara.” Tiga pulau terpadat berikutnya, berturut-turut adalah Sumatra dengan 17,8% penduduk dan 24,9% luas daratan; Sulawesi dengan 7,2% penduduk dan 9,4% luas daratan; serta Kalimantan dengan 4,4% penduduk dan 28,3% luas daratan. Selebihnya, sebesar 7,3% penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau lain.

Berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah, diketahui bahwa rata-

rata kepadatan penduduk secara nasional adalah 59 orang/km². Namun, kepadatan penduduk di Pulau Jawa melampaui angka tersebut, yakni sebesar 565 orang/km². Angka kepadatan penduduk di Jawa pun jauh melampaui Sumatra (38 orang/km²), Sulawesi (37 orang/km²), dan Kalimantan (9 orang/km²). Dengan demikian, Jawa memiliki kepadatan penduduk sekitar sepuluh kali lebih besar dari rata-rata nasional.

Dalam rangka mengatasi persoalan demografi itu, pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda berupaya untuk melakukan pemindahan penduduk yang dikenal dengan istilah kolonisasi (Dahlan 2014). Program ini dijalankan dengan cara memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke luar Pulau Jawa yang masih berpopulasi jarang. Upaya ini sejak awal dirancang sebagai kebijakan sosial dan pembangunan bagi para penganut Politik Etis yang hendak meringankan penderitaan masyarakat Hindia Belanda, khususnya bagi mereka yang bermukim di Pulau Jawa. Menurut mereka, salah satu penyebab terjadinya kesengsaraan di Pulau Jawa karena jumlah penduduk yang terlalu besar, sedangkan sumber daya alamnya cukup terbatas.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1950, program yang serupa dengan kolonisasi dilaksanakan oleh pemerintah. Program yang dikenal sebagai program transmigrasi ini diselenggarakan untuk mengatasi persoalan pemerataan jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah di Pulau Jawa (Prihatin 2013). Para peserta program diharuskan menetap

di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tujuan transmigrasi adalah membangun daerah di luar Pulau Jawa dengan cara memanfaatkan lahan-lahan yang luas untuk diolah dan digarap para transmigran menjadi tanah yang subur dan produktif. Luar Pulau Jawa yang dimaksud adalah Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan (Levang 2003).

Program transmigrasi mulai masuk di Kalimantan pada 1970-an. Saat itu, jumlah penduduk di pulau ini masih tergolong sedikit, khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Harjanti et al. 2022). Hasil Sensus Penduduk tahun 1971 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 2.019.924 jiwa dengan angka kepadatan penduduk 14 jiwa/km². Bila dibandingkan dengan Pulau Jawa yang angka kepadatan penduduknya 565 jiwa/km², maka Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang jarang penduduknya (Djawari 1975).

Salah satu daerah yang cukup terkenal sebagai daerah transmigrasi di Kalimantan Barat adalah Kecamatan Rasau Jaya. Belum diketahui siapa figur yang mengusulkan tempat ini sebagai daerah sasaran transmigrasi. Namun, dapat dipastikan bahwa pemilihan Rasau Jaya sebagai salah satu tempat pelaksanaan proyek transmigrasi didahului oleh sejumlah penelitian, seperti survei topografi oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan melalui proyek kanalisasi, survei tanah oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor, serta survei tata saluran yang melibatkan Universitas Gadjah

Mada dalam Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) (Septiyani 2014).

Program transmigrasi di kecamatan ini dilakukan secara bertahap atau bergelombang dengan menempatkan calon transmigran di unit desa yang berbeda-beda. Di tahun 1971/1975, calon transmigran ditempatkan di Unit Desa I. Selanjutnya, tahun 1972/1975 di Unit Desa II, tahun 1975/1977 di Unit Desa III, tahun 1976/1978 di Unit Desa IV, tahun 1977/1978 di Unit Desa V, dan tahun 1978/1979 di Unit Desa Air Putih.

Dalam pelaksanaannya, program transmigrasi tak selalu berjalan mulus. Permasalahan yang muncul terkait transmigrasi sangat rumit dan kompleks, mulai dari perencanaan, penyediaan lahan proyek, proses penempatan, hingga setelah penempatan. Yudohusodo (1988) mencatat bahwa terdapat tiga kendala utama dalam program transmigrasi. *Pertama*, kendala struktural berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat, dan sinkronisasi serta koordinasi dengan program sektor dan instansi lain yang terkait. *Kedua*, kendala substansial yang menyangkut kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional meskipun anggaran terbatas. *Ketiga*, kendala teknis operasional yang disebabkan oleh kompleksnya pembangunan transmigrasi. Kompleksitas dari segi operasional ini mencakup masalah pemilihan lokasi yang kurang tepat dan perencanaan teknis untuk merealisasi lokasi pilihan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, ketidaktepatan dalam studi kelayakan, penataan ruang yang kurang sesuai dengan pola usaha

tani, serta kurang terpadunya program antarsektor dan antarkegiatan pembangunan.

Di Rasau Jaya, permasalahan yang muncul antara lain: kondisi lahan gambut yang tidak tepat untuk diolah menjadi lahan pertanian karena sifat lahan gambut itu sendiri; akses yang sulit terhadap pasar; dan penggunaan dana proyek yang kurang tepat. Sekalipun program transmigrasi diwarnai dengan kisah kegagalan, tetapi masyarakat transmigran di Rasau Jaya masih mengapresiasi dan berterima kasih atas adanya program yang dilaksanakan pada era pemerintahan Soeharto.

Beberapa karya terdahulu yang telah melakukan pembahasan tentang pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia. Firmansyah, Superman, dan Bayuardi (2018), dengan hasil riset berjudul *Pengalaman Transmigrasi di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya)*, menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Desa Olak-Olak, merupakan salah satu tempat tujuan transmigrasi di Indonesia. Kelompok transmigran pertama datang ke daerah ini pada 1958, kemudian terus berlanjut hingga tahun 1959. Pada umumnya, para transmigran berasal dari daerah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Oktafiani dan Yogaswara (2020) melakukan riset dengan judul *Program Transmigrasi Boleh Gagal, Tetapi Transmigran Tetap Bertahan Hidup: Potret Keluarga Transmigran di Kabupaten Sorong, Papua Barat* untuk mengungkap sisi terang dari apa yang disebut transmigrasi gagal di Segun, Sorong, Papua Barat. Meskipun

program tersebut dianggap gagal secara nasional, namun setiap transmigran memiliki strateginya sendiri untuk bertahan dan berhasil di daerah baru.

Sementara itu, pembahasan secara khusus tentang transmigrasi di Rasau Jaya dapat ditemukan pada tulisan Arif (2019) dan Harjanti et al. (2022). Dalam artikel berjudul *Awal Kehidupan Masyarakat Transmigran di Rasau Jaya I*, Arif membahas tentang program transmigrasi sepanjang 1971 hingga 1974. Arif mendapati bahwa para transmigran mampu beradaptasi, berbaur, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan penduduk lokal. Menurut Arif, kesejahteraan para transmigran juga meningkat seiring dengan keseriusan mereka untuk menetap di Rasau Jaya sebagai tempat yang baru. Adapun artikel bertajuk *Kehidupan Masyarakat Transmigran di Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya tahun 1976* karya Harjanti et al. (2022), menguraikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pendatang di Rasau Jaya. Informasi ini metodik diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dari berbagai tempat, antara lain DKI Jakarta dan Tegal. Harjanti et al. menyimpulkan bahwa perpindahan yang “terproses dan tergorganisir” telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat transmigran. Hanya saja, persoalan kemiskinan yang menjadi salah satu persoalan dalam kesejahteraan luput dari pengamatan mereka.

Menurut Sajogyo (dalam Mahmud 2019:102) transmigrasi bukan hanya sekadar perpindahan penduduk dari

satu lokasi ke lokasi yang lain, tetapi juga merupakan perpindahan kemiskinan. Oleh karena itu, didasari pemikiran Sajogyo dan tinjauan dari keempat studi yang telah dilakukan sebelumnya, artikel ini menawarkan kebaruan melalui analisis lebih mendalam mengenai pelaksanaan program transmigrasi di Rasau Jaya, khususnya dari perspektif tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi para transmigran sepanjang periode 1971 hingga 1980.

Salah satu aspek penting yang ditelaah dalam artikel ini adalah isu kemiskinan yang dialami oleh para transmigran di Rasau Jaya, sebuah persoalan yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya. Fokus pada persoalan kemiskinan ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman mengenai tantangan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat transmigran. Meskipun mereka berhasil bertahan dan beradaptasi, tetapi sesungguhnya mereka masih menghadapi kendala signifikan dalam aspek ekonomi.

Selain itu, periode 1971 hingga 1980 ini penting untuk dibahas secara rinci karena memberikan konteks historis terhadap kebijakan transmigrasi yang berkembang dan terus berlanjut di Indonesia setelah tahun 1980. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menambah literatur mengenai keberlanjutan program transmigrasi, tetapi juga menyoroti dimensi sosial-ekonomi yang selama ini kurang terbahas dalam studi-studi sebelumnya.

B. METODE

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah

(Kuntowijoyo 2013). Metode ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pencarian sumber atau heuristik yang mencakup sumber tertulis dan sumber lisan, (3) kritik sumber atau disebut juga dengan proses verifikasi, (4) interpretasi atau penafsiran sumber, dan (5) historiografi.

Topik yang dipilih adalah efektivitas pelaksanaan program transmigrasi di Rasau Jaya (Kalimantan Barat) yang berlangsung sejak 1971 hingga 1980 dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Data yang terkait dengan topik tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Pengumpulan data dalam studi ini sebagian besar dikerjakan dengan cara memeriksa sejumlah dokumen resmi, antara lain Laporan Penyelenggaraan Transmigrasi di Rasau Jaya yang merupakan koleksi Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, serta dokumen terbitan Direktorat Penelitian dan Persiapan, Direktorat Jenderal Transmigrasi. Sumber lainnya adalah surat kabar sezaman, misalnya *Kompas*, ditambah dengan beberapa literatur dari berbagai sumber lain yang relevan dengan topik tulisan ini. Pencarian terhadap sumber-sumber tersebut dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Barat, serta Perpustakaan Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Tidak hanya dari sumber-sumber tertulis, terdapat pula data yang diperoleh dari proses wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan dua orang transmigran yang telah mengikuti program transmigrasi gelombang pertama di Rasau Jaya.

Meskipun tidak banyak narasumber yang diwawancarai, tetapi keterangan dari narasumber tersebut ditambah dengan kutipan-kutipan keterangan transmigran yang dihimpun dari artikel koran *Kompas*, dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang terjadi pada rentang waktu awal pelaksanaan transmigrasi di Rasau Jaya dan menguatkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber tertulis lain.

Setelah memperoleh data, tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan cukup kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan dua hal yang menyoal autentisitas sumber yang telah diperoleh, yakni: (1) kritik ekstern yang dilakukan dengan cara memeriksa kondisi material atau fisik dari sumber, dan (2) kritik intern yang dilakukan dengan cara menguji substansi dari informasi yang dikandung oleh sumber.

Setelah memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan merupakan sumber yang autentik, proses selanjutnya adalah interpretasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengaitkan dan membandingkan informasi yang terdapat pada satu sumber dengan sumber yang lain sehingga penulis bisa membuat argumentasi yang solid dari kepingan-kepingan informasi atau fakta yang terpecah di setiap sumber. Tahap terakhir dari seluruh proses ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahapan ini, penulis menyajikan narasi dan argumentasi berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Orde Baru dan Program Transmigrasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, transmigrasi bukanlah program yang khas dari Orde Baru. Namun, di era pemerintahan Soeharto, transmigrasi mulai dirancang ulang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Sejak awal, ketika militer berhasil mengukuhkan supremasinya pada paruh kedua 1960-an, program transmigrasi telah menjadi perhatian utama bagi sejumlah kelompok, terutama oleh militer dan teknokrat. Aktor utamanya, Presiden Soeharto, melihat program ini sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan dan masalah kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, para perancang ekonomi yang direkrut oleh Soeharto berusaha membangun argumentasi untuk melegitimasi program ini sebagai kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sekalipun pada dasarnya mereka tidak begitu memprioritaskan program pemerataan penduduk ini (Tirtosudarmo 1999).

Pada masa Orde Baru, tujuan utama dari program transmigrasi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan kesempatan kerja di daerah proyek pembangunan di luar Jawa, disertai klaim bahwa program ini menjadi salah satu jembatan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Rahardjo 1979).

Namun, di balik motif ekonomi tersebut, program transmigrasi pada dasarnya juga mengandung motif

politik dan memiliki corak ideologis, yakni sebagai salah satu instrumen untuk mengakselerasi proses integrasi nasional. Hoey (2003) menyebut program ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh rezim Orde Baru untuk membangun komunitas imajiner (*imagined community*) dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Selain itu, transmigrasi juga dipengaruhi oleh cara pandang warisan kolonial yang masih tampak dalam negara Orde Baru, yang melihat bahwa daerah luar Jawa sebagai lahan kosong yang bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi penduduk yang saat itu terkonsentrasi di Pulau Jawa (Tirtosudarmo 1999).

Pada gilirannya, upaya menggalakkan program transmigrasi berhasil mengubah skema reforma agraria yang diluncurkan pada 1960. Transmigrasi seperti menjadi kata ganti alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas tanah, menggantikan istilah reforma agraria atau *landreform* yang lekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagaimanapun, pemerintah Orde Baru paham bahwa padatnya penduduk di Jawa tidak lagi mampu menyediakan lahan pertanian. Dengan mengadopsi gagasan inti dari reforma agraria yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Soeharto menjalankan program transmigrasi sebagai misi utama dengan cara memberikan lahan bagi masyarakat di tempat yang baru (Salim 2019).

Oleh karena itu, selama periode Orde Baru transmigrasi menjadi salah satu kebijakan dalam program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Program Pelita berlangsung pada 1969-

1984, yang terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu Pelita I, Pelita II, dan Pelita III. Kebijakan Pelita I berfokus pada kegiatan pembangunan pedesaan, berbeda dengan tujuan transmigrasi untuk distribusi penduduk seperti pada periode sebelumnya. Di Pelita II, peserta transmigrasi tidak hanya ditujukan untuk petani, melainkan juga untuk para veteran melalui program yang dilaksanakan oleh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Adapun di Pelita III, transmigrasi ditujukan pada upaya perluasan populasi dan pembangunan komunitas baru untuk mendukung pengembangan daerah asal dan daerah transmigrasi (Dahlan 2014).

2. Topografi Wilayah Transmigrasi Rasau Jaya

Kecamatan Rasau Jaya terdapat di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Jarak Kecamatan Rasau Jaya dengan ibu kota kabupaten sekitar 15 km, sedangkan dengan ibu kota provinsi sekitar 30 km. Kecamatan Rasau Jaya berdiri pada 24 Juli 1997 (Tim Publikasi Kecamatan Rasau Jaya 2020). Dahulu, Rasau Jaya merupakan bagian dari Kecamatan Sungai Kakap, tepatnya di wilayah Desa Punggur, dan masih berstatus sebagai Rukun Warga (RW) sebelum berkembang menjadi wilayah mandiri (Arif 2019).

Sebelum kedatangan transmigran, wilayah Rasau Jaya masih merupakan hutan belantara. Sarana transportasi yang tersedia hanya melalui jalur air. Sopiah, transmigran di Desa Rasau Jaya Satu, pada 16 Juli 2022 di Rasau Jaya, mengatakan bahwa “Saat pertama kali datang di Rasau Jaya tahun 1971, masih menggunakan motor air. Belum ada

transportasi darat. Saat itu, untuk dapat berkunjung ke Kota Pontianak saja sampai harus seharian penuh.” Pernyataan Bejo berikut ini mengonfirmasi hal tersebut. “Tahun 1971/1972, masyarakat Rasau Jaya sangat sulit menemukan transportasi darat karena jalan menuju ke Kota Pontianak masih belum dibuat dan masih hutan belantara,” jelas Bejo, transmigran di Desa Rasau Jaya Satu, pada 19 Juli 2022 di Rasau Jaya.

Setelah adanya permukiman di Rasau Jaya, perlahan infrastruktur transportasi darat mulai dibangun oleh pemerintah berupa akses jalan dari dan menuju Kota Pontianak. Jalan tersebut kemudian menjadi penghubung masyarakat transmigran untuk mencapai Kota Pontianak melalui jalur jalan darat. Saat ini, jalan penghubung antara Rasau Jaya dan Pontianak telah berstatus jalan provinsi sehingga perbaikan demi perbaikan cenderung lebih sering dilakukan. Keberadaan jalan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan perekonomian.

Rasau Jaya merupakan wilayah dataran delta Sungai Kapuas. Di sebelah selatan, terdapat Bukit Ambawang dengan tinggi sekitar 400 meter. Rasau Jaya dilintasi sejumlah sungai-sungai besar, seperti Sungai Punggur Besar, Sungai Kubu, dan Sungai Ambawang. Selain itu, terdapat pula beberapa anak sungai, seperti Sungai Rasau, Sungai Nipah, Sungai Bulan, Sungai Arus Deras, Sungai Pinang Luar, Sungai Pinang Dalam, dan Sungai Air Putih.

Area lahan yang tersedia untuk program transmigrasi di Rasau Jaya berupa tanah gambut dengan ketebalan

gambut sekitar 0,3-4,5 meter (Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980). Kondisi lahan tersebut menjadi tantangan besar bagi para transmigran yang ingin melakukan aktivitas bertani di lahan gambut yang ada di wilayah Rasau Jaya (Tampubolon et al. 2020).

3. Sejarah Transmigrasi di Rasau Jaya

Pada paruh pertama 1970-an, Rasau Jaya merupakan kawasan yang dikenal sebagai Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) Rasau Jaya yang membawahi sebelas Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Satuan permukiman tersebut terdiri atas enam UPT di Kecamatan Sungai Kakap dan lima UPT di Kecamatan Kubu. Di Kecamatan Rasau Jaya yang terbagi menjadi tujuh desa, enam desa di antaranya merupakan desa definitif yang termasuk dalam program transmigrasi. Desa-desanya tersebut adalah Desa Rasau Jaya I, Rasau Jaya II, Rasau Jaya III, Bintang Mas, Pematang Tujuh, dan Sungai Bulan. Satu desa lainnya merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk asli, yakni Desa Rasau Jaya Umum (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008).

Dalam menjalankan proyek transmigrasi di Rasau Jaya, pemerintah Orde Baru menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perguruan tinggi, yaitu dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Departemen Pertanian, Dinas Pertanian, dan

Universitas Gadjah Mada (Septiyani 2014). Transmigrasi di Rasau Jaya tergolong transmigrasi umum sebab seluruh pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program dibebankan kepada pemerintah (Fransiska et al. 2020).

Selain transmigrasi umum, terdapat pula program transmigrasi swakarya di Rasau Jaya. Transmigrasi swakarya merupakan program yang diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi yang memberikan bantuan kepada para transmigran dalam bentuk jaminan hidup selama beberapa bulan. Para transmigran juga diberi lahan untuk diolah menjadi sumber penghasilan (Amir 2019).

Program transmigrasi di Rasau Jaya disebut dengan proyek transmigrasi Rasau Jaya (Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980). Proses kedatangan para transmigran dari Pulau Jawa menuju Rasau Jaya membutuhkan waktu selama berbulan-bulan. Faktor yang membuat prosesnya menjadi lama karena adanya beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon transmigran, misalnya pada proses pendaftaran dan keberangkatan, ditambah lagi kapal yang sering kali transit di beberapa tempat sebelum tiba di tujuan akhir. Sejumlah transmigran bahkan ada yang diberhentikan untuk ditampung di rumah-rumah ataupun asrama dengan jangka waktu seminggu hingga sebulan (Firmansyah et al. 2018).

Transmigran yang menuju ke Rasau Jaya ditempatkan untuk sementara waktu di Asrama Batu Layang atau yang dikenal juga dengan nama Balai

Transmigrasi Batu Layang, sesaat setelah sampai di pelabuhan *transito* Batu Layang Pontianak (Arif 2019; Septiyani 2014). Transit harus dilakukan karena belum rampungnya penyiapan fasilitas untuk para transmigran di Rasau Jaya, terutama lahan garapan dan rumah yang siap huni. Selain itu, untuk mencapai lokasi proyek transmigrasi di Rasau Jaya, para transmigran harus menempuh jarak yang memakan waktu hingga 10 jam perjalanan jalur air melalui Sungai Kapuas (Kasidi dan Soehardi 1972).

Masalah keterlambatan proyek penyediaan rumah bagi para transmigran di Rasau Jaya diungkapkan oleh Kasidi dan Soehardi (1972). Mereka memaparkan bahwa proyek transmigrasi di Rasau Jaya baru merampungkan tujuh buah kerangka bangunan serta menyelesaikan satu unit rumah, padahal terdapat 150 Kepala Keluarga (KK) yang hendak ditempatkan di Rasau Jaya pada akhir Februari 1971. Proyek penyiapan lahan garapan untuk para transmigran juga mengalami keterlambatan. Proses penebangan pohon untuk pembersihan lahan dilakukan dengan jumlah tenaga kerja yang minim, namun di bawah desakan waktu yang singkat. Pada tahun 1969/1970, lahan dan semak belukar serta rawa-rawa di Rasau Jaya menjadi wilayah permukiman transmigrasi, dengan fasilitas yang didapat berupa perumahan, Sekolah Dasar Inpres, lahan pasang surut, balai penyuluhan, Koperasi Unit Desa (KUD), dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) (Tobing 1982a).

Program transmigrasi pertama kali dilakukan di Rasau Jaya pada 1971.

Para transmigran ditempatkan di Unit Desa I atau sekarang disebut Desa Rasau Jaya Satu. Saat itu, terdapat 25 KK yang berasal dari Jawa Tengah. Mereka ini disebut sebagai “penduduk Jawa perintis” di Rasau Jaya (Fransiska et al. 2020).

Selanjutnya, memasuki tahun 1972, gelombang transmigran pertama dari Jawa Timur datang di Rasau Jaya. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, beberapa di antaranya adalah Malang, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Surabaya, dan Jember (Tobing 1982a). Jumlah mereka sebanyak 150 KK, yang terdiri atas 693 jiwa. Di saat itu, rencana penyelesaian pengiriman transmigran ke Rasau Jaya diharapkan selesai pada pertengahan Maret 1972 (Kasidi dan Soehardi 1972).

No.	Unit Desa	KK	Jiwa	Tahun
1	I	444	2.053	1971/75
2	II	506	2.174	1972/75
3	III	640	2.536	1975/77
4	IV	729	3.103	1976/78
5	V	450	1.930	1977/78
6	Air Putih	142	712	1978/79

Tabel 1. Penempatan transmigran di Rasau Jaya. Sumber: Ditjen Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1971 sampai 1980, program transmigrasi di Rasau Jaya telah menempatkan 2.769 KK dengan jumlah 11.796 jiwa transmigran (Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980).

Sementara itu, Unit Desa III atau Rasau Jaya III merupakan daerah pertama yang dibuka saat Pelita II

berlangsung. Karena memiliki lahan yang luas, daerah ini dijadikan tempat bermukim bagi para transmigran yang berasal dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan porsi transmigran terbesar datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur (Direktorat Jendral Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980). Total jumlah KK yang bermukim di Rasau Jaya III pada periode 1975-1977 adalah 640 KK, yang terdiri atas 2.536 jiwa.

4. Pelaksanaan Transmigrasi di Rasau Jaya

Pelaksanaan transmigrasi di Kalimantan Barat sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1955. Namun, program transmigrasi di Rasau Jaya baru dilaksanakan pada periode Pelita I (1969-1974), tepatnya pada 1971/1972. Menurut Davis (1976), tujuan Pelita I ditekankan pada upaya pembangunan daerah dan integrasi daerah dengan negara. Transmigrasi secara substansial dianggap dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan itu.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat memberikan sejumlah bantuan, yakni:

- a. tanah 2 hektare yang terdiri atas lahan pekarangan sebesar 0,4 hektare dan lahan perladangan sebesar 0,6 hektare yang difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan 1 hektare lainnya dibuka sendiri oleh transmigran;
- b. perumahan sederhana;
- c. bantuan pangan selama 18 bulan;
- d. bibit-bibit tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan tanaman perkebunan;

- e. alat-alat pertanian dan alat-alat dapur;
- f. pakaian;
- g. obat pemberantas hama, pestisida, dan alat penyemprot hama (*spayer*) satu unit/RT;
- h. pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan anggaran;
- i. bantuan ternak sapi, kambing, dan ayam yang dikelola dengan sistem bagi hasil.

Hunian yang disediakan oleh pemerintah berupa rumah dengan ukuran 3x4 meter. Dindingnya terbuat dari tripleks. Atapnya berbahan daun. Sejumlah transmigran mengaku bahwa di saat hujan, atap daun itu kerap bocor. Peningkatan kualitas perumahan transmigran, baru dilakukan pada periode 1979/1980, saat Presiden Soeharto mengucurkan dana sebesar Rp550.000.000 untuk program transmigrasi. Atap yang semula terbuat dari daun diganti dengan atap berbahan seng (Nurzanah et al. 2018).

Rincian pemberian bantuan kepada setiap transmigran diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, yang menyebutkan bahwa “transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.” Bantuan lain juga diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang secara khusus mengatur pembagian jatah berupa tanah bagi transmigran, dengan rincian seperti berikut ini.

- a. Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikitnya 2 hektare yang penggunaannya dibagi menjadi

dua, yakni lahan untuk pekarangan sebesar 0,25 (seperempat) hektare dan 1,75 hektare sisanya digunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.

- b. Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikitnya seluas 0,25 (seperempat) hektare yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.

Kasidi dan Soehardi (1972:14) juga mengungkapkan bahwa “program transmigrasi mendapat perhatian serius dan menjadi program prioritas dari Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.” Perhatian tersebut ditunjukkan melalui rencana pembangunan yang saat itu sedang digarap di Kalimantan Barat dengan sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan transmigrasi.

Sumber	Jumlah Dana	Realisasi	
		Dana	Persentase
Pelita Daerah Tk. I	1.699	1.363	80,2
Pelita Nasional	5.215	2.119	40,6
Inpres Kab/Kota	697	524	75,2
Inpres SD	302	201	66,6
Inpres Kesehatan	105	43	41
Total	8.018	4.250	53

Tabel 2. Anggaran dan realisasi pembangunan tahun 1974/1975 sampai dengan 31 Maret 1975 di Kalimantan Barat (dalam jutaan rupiah). Sumber: Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980.

Pada kenyataannya, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 1975 hanya sebesar 53%, sedangkan sisa anggaran sebesar 47% dipergunakan di tahun berikutnya. Di Rasau Jaya, anggaran disalurkan

melalui dana Inpres SD, dalam bentuk pembangunan SD di 5 unit desa; anggaran yang dialokasikan untuk guru tetap sebanyak 49 orang dan guru honor 45 orang; bantuan untuk 2.730 orang murid; serta pengadaan 94 lokal (Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Barat 1975).

5. Keluar dari Kemiskinan: Tantangan Sosial-Ekonomi Transmigran di Rasau Jaya

Adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap transmigran di Rasau Jaya, antara lain berupa fasilitas hidup dan lahan garapan, tidak serta merta membuat taraf hidup mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di daerah baru, yang kondisinya tidak mereka tahu sebelumnya, dipenuhi dengan tantangan yang harus dihadapi. Semangat untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, terutama dari segi ekonomi, menjadi faktor utama yang mendorong para transmigran untuk turut serta dalam program transmigrasi ini. Hanya saja, semangat itu tak jarang harus berhadapan dengan persoalan yang bersumber dari pelaksana proyek, dalam hal ini adalah pemerintah.

Seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan program transmigrasi di Rasau Jaya sangat jelas terlihat mulai dari proses perencanaan, penempatan, hingga pasca-penempatan. Di awal kedatangan, para transmigran dari Pulau Jawa yang telah sampai di Pontianak harus ditempatkan terlebih dulu di Asrama Batu Layang selama berbulan-bulan. Alasannya adalah perumahan

untuk para transmigran dan proses pembukaan lahan pertanian di Rasau Jaya yang belum selesai (Kasidi dan Soehardi 1972). Ketidaksiapan fasilitas perumahan untuk para transmigran ini ditemukan dalam berita yang ditulis oleh Tobing (1982a) di harian *Kompas*, yang memuat pengakuan Sumartono, Kepala Desa Rasau Jaya II saat itu. Sumartono mengatakan, “Saya sampai di sini tahun 1972. Selama enam bulan pertama belum ada tempat tinggal. Bersama rombongan asal Jawa Tengah yang berjumlah 150 KK, kami terpaksa menumpang di rumah transmigran yang sudah duluan datang.”

Rasa senasib sepenanggungan karena belum rampungnya proses pendirian tempat tinggal di tempat tujuan menjadi pendorong awal bagi para transmigran di Rasau Jaya untuk saling berkomunikasi aktif. Di sisi lain, proses “menciptakan manusia baru” dalam program transmigrasi membutuhkan modal dan keterampilan. Sesungguhnya, modal itu sudah ada, yakni berupa lahan pertanian yang diberikan pemerintah seluas 1,75 hektare. Namun, keterampilan mengolah lahan pertanian yang selama ini telah dimiliki dan dipraktikkan oleh para transmigran saat di daerah asal, pada kenyataannya tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di Rasau Jaya. Para transmigran di Rasau Jaya kesulitan untuk menggarap lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah karena kondisi tanahnya berbeda dengan daerah asal.

Karena ketidakmampuan dalam mengolah lahan garapan, sebagian transmigran di Rasau Jaya memilih menjadi buruh. Kenyataan ini menjadi

sebuah persoalan baru dalam pelaksanaan program transmigrasi. Seperti yang disampaikan para transmigran di Rasau Jaya pada berita harian *Kompas* (dalam Tobing 1982b), “Kami bukannya tidak mau menggarap lahan dari pemerintah. Tetapi karena ini lahan pasang surut yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, menjadikan kami terpaksa mencari pekerjaan lain agar tetap bisa hidup.”

Selain lahan pasang surut yang mengandung zat asam tinggi, kondisi tanah gambut menjadi keluhan berikutnya dari para transmigran. Mereka harus membakar ilalang atau serbuk kayu di atas lahan tersebut, kemudian menggaruk lahan menggunakan garpu tani secara perlahan. Tetapi menurut Sumartono (dalam Tobing 1982b), “Ketika datang hujan lebat, pembakaran itu tidak ada gunanya dan harus diulang kembali, baru kemudian dapat ditanami.” Bila dibandingkan dengan proses penggarapan tanah humus, penggarapan tanah gambut ini memerlukan tenaga dan biaya ekstra. Hasil yang diperoleh pun tak seberapa.

Rincian hasil produksi tanaman pangan pokok berupa padi maupun palawija, seperti jagung, kacang tanah, kedelai, dan ubi kayu yang ada di Rasau Jaya, dari Unit Desa I hingga V, dapat dicermati pada tabel 3.

Jenis	Hasil Produksi (Kw/Ha)				
	UD I	UD II	UD III	UD IV	UD V
Padi	16,42	11,66	14,88	12,11	22,03
Jagung	11,46	6,8	4,35	3,2	14
Kacang Tanah	3,16	16,75	10,08	-	10,8
Kedelai	6,64	8,4	12	2,75	16
Ubi Kayu	81,33	124,7	-	11,56	-

Tabel 3. Hasil ubi dan padi rata-rata tahun 1979/1980 dan palawija tahun 1980 di proyek transmigrasi Rasau Jaya (kw/ha).
 Sumber: Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980.

Besarnya komoditas ubi kayu di Rasau Jaya dengan total 217,26 kw/ha mengalahkan komoditas utama, yaitu padi, yang saat ini menjadi bahan pangan utama. Walaupun menjadi komoditas terbesar, harga ubi kayu saat itu tetap tidak mampu membuat para transmigran menjadi sejahtera. Hal itu diungkapkan oleh beberapa transmigran Rasau Jaya kepada Tobing (1982b) yang dimuat di harian *Kompas*, bahwa “Harga singkong hanya Rp10/kg. Kalau dihitung dengan biaya transportasi untuk mengangkutnya ke pasar hingga tenaga yang dibayar untuk memikulnya tidak ada hasil yang bisa disisakan.”

Di satu sisi, harga jual ubi kayu yang menjadi penghasilan utama dari sektor pertanian di Rasau Jaya, tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, biaya produksi lebih tinggi dari harga jualnya sehingga mendatangkan kerugian bagi para petani. Permasalahan ini diperburuk dengan kondisi harga pangan di daerah proyek transmigrasi di Rasau Jaya yang tergolong sangat tinggi. Menurut Marman pada *Kompas* (Anonim 1975), “harga beras Rp250/kg, minyak kelapa Rp500/botol, gula

pasir Rp250/kg, dan minyak tanah Rp80/botol.”

Karena masyarakat kesulitan menjual ubi kayu dengan harga pasar yang tinggi, ditambah lagi menghadapi persoalan tingginya harga pangan di proyek transmigrasi Rasau Jaya, maka mereka harus mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi mempertahankan hidup. Upaya yang dilakukan para transmigran untuk mengatasi persoalan ekonomi dan keluar dari kemiskinan ditempuh dengan mencari pekerjaan di luar sektor pertanian yang ditekuni oleh para transmigran di Rasau Jaya sehari-hari. Mereka kemudian ada yang menjadi buruh bangunan atau buruh kayu. Bahkan, ada pula yang terpaksa menjadi gelandangan di Kota Pontianak dan bekerja serabutan yang tidak membutuhkan keahlian.

Bagi mereka yang beruntung, keterampilan bertukang yang dimiliki oleh beberapa transmigran di Rasau Jaya cocok dan cukup memadai untuk menjadi buruh bangunan. Kebutuhan akan tukang atau buruh bangunan sempat mengalami peningkatan ketika dilakukan pembangunan perumahan untuk para transmigran di Rasau Jaya. Di saat itu, pemerintah mengalami masalah kekurangan tenaga kerja yang mampu diisi oleh para transmigran yang memiliki keterampilan bertukang. Hal ini juga ditemukan dalam laporan Kasidi dan Soehardi (1972:7), yang mengatakan bahwa “tambahan tenaga teknis tukang dibutuhkan untuk ikut mengerjakan pembuatan rumah dengan upah kerja.”

Selain di sektor pertukangan, ada pula transmigran yang memilih menjadi buruh kayu. Di masa itu, permintaan dan harga jual kayu memang sedang tinggi. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa menjadi buruh kayu akan lebih menjanjikan ketimbang menjadi petani atau buruh bangunan. Keterlibatan di dalam sektor ini membuat masyarakat transmigran Rasau Jaya tidak hanya berkatat pada urusan-urusan yang terkait dengan struktur ekonomi agraris di tingkat desa, tetapi sudah mencapai tingkat struktur pasar internasional yang dikendalikan negara-negara konsumen kayu, seperti Jepang dan Amerika Serikat (Tobing 1982b).

Tidak seperti yang diharapkan, meskipun harga kayu dipandang menjanjikan, tetapi pendapatan dari sektor ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Pada artikel *Kompas* yang ditulis oleh Tobing (1982a), terdapat keterangan dari Mudin, salah satu transmigran Rasau Jaya yang sudah sembilan setengah tahun bekerja dari hasil kayu. Mudin mengatakan, “Jangankan [pulang] ke Jawa, makan saja sulit. Dari hasil cari balok kayu, saya menerima upah Rp1.250/hari. Ini belum dengan potongan ransum selama di hutan, yang kerap memakan waktu sampai sebulan.”

Gelandangan pun menjadi salah satu potret para transmigran di Rasau Jaya. Terdapat kurang lebih 15 KK, yang terdiri atas 60 jiwa dari daerah DKI Jakarta yang mengikuti proyek transmigrasi di Rasau Jaya, yang terlihat menggelandang di pasar-pasar yang ada di Kota Pontianak. Kaum laki-laki beserta anak dan istrinya tinggal di

pojok-pojok gang dan los-los sempit antara bangunan-bangunan bertingkat di sekitar Jalan Asahan dan beberapa tempat lainnya. Pekerjaan para lelaki tersebut adalah mengumpulkan sandal/sepatu yang sudah dibuang atau panci-panci dan barang-barang bekas lainnya untuk dijual lagi. Adapun perempuan dan anak-anak mengumpulkan beras-beras yang tercecer di tempat pembongkaran muatan kapal (Anonim 1975). Berdasarkan laporan Pusat Data dan Analisa *TEMPO* (1974), sebagian besar gelandangan yang menjamur di Pontianak merupakan transmigran yang berasal dari DKI Jakarta.

Pada 1970 dan periode 1972/1973, di tiap-tiap tahun tersebut, setidaknya terdapat 100 KK yang diboyong ke Rasau Jaya dengan jaminan hidup dari pemerintah selama delapan belas bulan sejak tiba di tempat tujuan. Dalam perkembangannya, telah mengemuka sejumlah alasan yang diungkapkan oleh para transmigran mengapa mereka meninggalkan permukiman transmigrasi, lalu mengadu nasib ke Kota Pontianak dan menjadi tunawisma di lorong-lorong bangunan kota. Beberapa penyebabnya antara lain sawah mereka diserang tikus, tertutupnya akses terhadap lapangan kerja, serta lambatnya hasil yang diperoleh dari panen ubi kayu dan cabai.

Keputusan para transmigran untuk mencari hidup di Kota Pontianak telah membuat Halim Anang (kepala proyek transmigrasi saat itu) dan Jamilan (Kepala Dinas Bina Karya Jawatan Sosial) menjadi kerepotan. Pada 1974, pernah terjaring 51 gelandangan yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta. Pusat Data dan Analisa *TEMPO* (1974)

juga menyebut bahwa sebagian besar transmigran dari DKI Jakarta adalah eks gelandangan. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa latar belakang mereka yang tidak memiliki keterampilan bertani turut berkontribusi pada tingkat kemampuan mereka untuk bertahan hidup di Rasau Jaya. Mereka kalah berhasil bila dibandingkan dengan para transmigran dari Jawa Timur yang sukses dalam mengolah pertanian. Bahkan, beberapa dari transmigran yang berasal dari Jawa Timur mampu memboyong puluhan KK dari daerah asal yang sama dan masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka untuk meniti hidup bersama di Rasau Jaya.

Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru membuat beberapa transmigran di Rasau Jaya meninggalkan lokasi di mana mereka ditempatkan sebagai peserta program transmigrasi. Para transmigran yang meninggalkan Rasau Jaya ada yang kembali ke daerah asal, dipulangkan oleh pelaksana proyek, ataupun melarikan diri (pergi tanpa keterangan). Berikut ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan statistik terkait jumlah dan daerah asal para transmigran yang meninggalkan lokasi penempatan mereka.

Daerah Asal	Pulang	
	KK	Jiwa
Jawa Timur	10	44
Jawa Tengah	0	0
DI Yogyakarta	0	0
Jumlah	10	44

Tabel 4. Jumlah transmigran di Desa Rasau Jaya Satu berdasarkan daerah asal yang memutuskan pulang ke daerah asalnya. Sumber: Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980.

Daerah Asal	Dipulangkan	
	KK	Jiwa
Jawa Timur	2	10
Jawa Tengah	0	0
DI Yogyakarta	0	0
Jumlah	2	10

Tabel 5. Jumlah transmigran di Desa Rasau Jaya Satu berdasarkan daerah asal yang dipulangkan ke daerah asalnya. Sumber: Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980.

Daerah Asal	Melarikan Diri	
	KK	Jiwa
Jawa Timur	13	53
Jawa Tengah	7	7
DI Yogyakarta	5	19
Jumlah	25	79

Tabel 6. Jumlah transmigran di Desa Rasau Jaya Satu berdasarkan daerah asal yang melarikan diri. Sumber: Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 1980.

Berdasarkan tabel 4, 5, dan 6, diketahui bahwa jumlah terbesar transmigran yang meninggalkan lokasi penempatan di Desa Rasau Jaya Satu berasal dari Jawa Timur, baik karena keputusan sendiri, dipulangkan, maupun melarikan diri. Jumlah totalnya adalah 25 KK, dengan estimasi sebanyak 107 jiwa. Sebaliknya, transmigran dari Jawa Tengah paling sedikit yang meninggalkan lokasi penempatan. Tidak ada transmigran dari Jawa Tengah yang memutuskan pulang dan dipulangkan, hanya terdapat 7 KK dengan estimasi 7 jiwa yang melarikan diri dari Desa Rasau Jaya Satu.

Banyak transmigran asal Jawa Timur meninggalkan lokasi penempatan di Rasau Jaya karena merasa kurang nyaman tinggal di wilayah tersebut. Mereka menilai kehidupan di daerah

asal masih lebih baik dibandingkan tinggal di tengah “hutan” Kalimantan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sopiah, seorang transmigran dari Bojonegoro (Jawa Timur) pada 16 Juli 2022 di Rasau Jaya, yang mengungkapkan bahwa di awal kedatangannya ke lokasi penempatan di Kalimantan Barat, banyak transmigran dari Jawa Timur yang merasa tidak betah menetap di Rasau Jaya. Oleh karena itu, beberapa dari mereka memilih pulang kembali ke daerah asal, baik dengan izin maupun tanpa izin dari kepala proyek transmigrasi.

D. SIMPULAN

Kisah mengenai kehidupan sosial-ekonomi transmigran di Rasau Jaya sejak 1971 hingga 1980 menunjukkan bahwa program transmigrasi yang digalakkan oleh rezim Orde Baru tidak sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, yakni mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat capaian ini, mulai dari persiapan pemerintah yang kurang, keterampilan dasar para transmigran untuk bertani dan berkebun, hingga kondisi ekologis wilayah Rasau Jaya.

Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat sejumlah transmigran yang berhasil, berdaya, dan mencapai kesejahteraan secara ekonomi, tetapi sebagian yang lain tidak seperti itu. Kondisi kemiskinan para transmigran dapat ditunjukkan dengan adanya data bahwa terdapat sejumlah transmigran yang meninggalkan Rasau Jaya dan pergi ke Pontianak, lalu menjadi gelandangan dan bekerja sebagai

pemulung. Bahkan, ada pula yang kembali ke daerah asalnya karena tidak mampu menjalani hidup di Rasau Jaya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, para transmigran yang berasal dari Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai peserta program transmigrasi yang paling tangguh untuk hidup di daerah baru. Sebaliknya, transmigran dari Jawa Timur banyak yang memutuskan untuk pulang ke daerah asalnya ataupun dipulangkan oleh penyelenggara proyek. Sama halnya dengan beberapa transmigran dari DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, transmigran dari Jawa Timur pun ada yang melarikan diri atau pergi dari Rasau Jaya tanpa sepengetahuan pihak penyelenggara proyek. Berbeda dengan transmigran yang berasal dari daerah urban atau kota besar, yakni DKI Jakarta, mereka banyak yang menyambung hidup dengan menjadi gelandangan dan bekerja serabutan di Kota Pontianak.

Walaupun diperoleh data mengenai keragaman atau perbedaan kondisi transmigran berdasarkan daerah asalnya, tetapi data tersebut masih terbatas dan belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat simpulan mengenai karakteristik transmigran berdasarkan daerah asalnya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah daerah asal turut berpengaruh dalam tingkat resiliensi atau kemampuan adaptasi transmigran di daerah baru.

Program transmigrasi terlihat telah membawa sejumlah perubahan fisik di daerah Rasau Jaya. Daerah yang semula merupakan rawa dan hutan belantara tak berpenghuni, berubah menjadi

kawasan permukiman dan tempat produksi bagi tanaman pangan maupun palawija. Perubahan-perubahan tersebut seharusnya sejalan dengan tujuan program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yakni berupaya mewujudkan pemerataan penduduk dan membuat daerah-daerah di Indonesia terintegrasi secara nasional. Namun, kondisi ideal tersebut tidak sepenuhnya terwujud ketika upaya pemerintah tersebut bersinggungan dengan harapan para transmigran yang ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik di tempat baru.

Pelaksanaan transmigrasi tidak selalu berjalan mulus. Harapan para transmigran yang memutuskan untuk mengikuti proyek ini terkadang tidak selaras dengan kemampuan pelaksana (pemerintah) untuk menyelenggarakan program transmigrasi dengan baik. Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah kepada para transmigran, pada kenyataannya harus berbenturan dengan masalah-masalah yang timbul, baik di tahap persiapan maupun pada saat pelaksanaan program. Beberapa di antaranya adalah masalah keterlambatan penyelesaian rumah dan lahan garapan, sulitnya para transmigran untuk mengolah lahan pasang surut dan kondisi tanah gambut, ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi dari komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sukarnya memperoleh lapangan pekerjaan alternatif yang berpeluang menambah pendapatan rumah tangga.

Berbagai kesulitan yang dihadapi dan terbatasnya kemampuan beradaptasi di daerah baru, membuat sebagian transmigran terpaksa memutuskan

kembali ke daerah asalnya. Tantangan paling berat yang dihadapi oleh para transmigran tersebut kerap berkisar pada persoalan-persoalan ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Idealnya, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan program pada periode 1971-1980 dapat menjadi bahan evaluasi bagi keberlanjutan program transmigrasi di masa selanjutnya. Kiranya perlu merumuskan kembali indikator keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program transmigrasi serta mengkaji pelaksanaan program pada periode selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai alasan di balik keputusan pemerintah yang tetap melaksanakan program transmigrasi, khususnya setelah tahun 1980-an.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Arsip Daerah Kalimantan Barat, serta Perpustakaan Kependudukan dan Kebijakan UGM, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan saat ini.

DAFTAR SUMBER

- Amir, Muh Nasrullah. 2019. *Detak Transmigrasi Menjelur Nadi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Anonim. 1975. "Transmigran Menggelandang di Pontianak." *Kompas*, Juli, 2.

- Arif, Muhammad. 2019. "Awal Kehidupan Masyarakat Transmigrasi di Rasau Jaya 1." *MASA: Journal of History* 1(2):138-54.
- Dahlan, M. Halwi. 2014. "Perpindahan Penduduk dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuminggakari, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979)." *Patanjala* 6(3):335-48.
- Davis, Gloria Jean. 1976. "Parigi: A Social History of the Balinese Movement to Central Sulawesi, 1907-1974." Disertasi, Stanford University, California.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2008. *Profil Kondisi dan Potensi Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pontianak*. Pontianak: PT Visiprana.
- Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. 1980. *Proyek Transmigrasi Rasau Jaya di Propinsi Kalimantan Barat: Penyelenggaraan Trans di Rasau Jaya*.
- Djawari. 1975. "Masalah Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kalimantan Barat." Laporan, Program Perencanaan Nasional FE UI Bappenas, Jakarta.
- Firmansyah, Andang, Superman, dan Galuh Bayuardi. 2018. "Pengalaman Transmigrasi di Indonesia (Studi di Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya)." *Jurnal HISTORIA* 6(2):379-90.
- Fransiska, Meliya, Efriani, Diaz Restu Darmawan, Lyudmita K. M. Bakara, dan Eginta Sai Sari Ginting. 2020. "Adaptasi Ekologi Penduduk Transmigrasi di Desa Rasau Jaya Satu." *Pangadereng* 6(1):1-12.
- Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Barat. 1975. *Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Barat, Disampaikan Kepada DPRD Tk. I Kalbar Tanggal 15 Agustus 1975*.
- Harjanti, Diah Trismi, Stella Caroline Aurellia, Girli Fifta Childra, dan Khusnul Khotimah. 2022. "Kehidupan Masyarakat Transmigran di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Tahun 1976." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13(2):711-16.
- Hoey, Brian A. 2003. "Nationalism in Indonesia: Building Imagined and International Communities Through Transmigration." *Ethnology* 2(2):109-26.
- Kasidi, dan Soehardi. 1972. *Laporan Survey Evaluasi Obyek-Obyek Transmigrasi di Sei Kakap, Tekam dan Suap, Kubu serta Sei Rasau di Kalimantan Barat*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Persiapan Direktorat Jenderal Transmigrasi.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

- Levang, Patrice. 2003. *Ayo ke Tanah Sabrang*. Jakarta: KPG.
- MacAndrews, Colin. 1978. "Transmigration in Indonesia: Prospects and Problems." *Asian Survey* 18(5):458-72.
- Mahmud, Amir. 2019. "Rekonstruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan dalam Perspektif Agraria Kritis." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5(1):99-111.
- Manay, Helman. 2016. "Proyek Demografi dalam Bayang-Bayang Disintegrasi Nasional: Studi tentang Transmigrasi di Gorontalo, 1950-1960." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 1(2):93-106.
- Nurzanah, Seravina, Muhammad Irfan M, dan Fransiskus Iwan P. 2018. "Perjalanan Transmigran Asal DKI Jakarta ke Rasau Jaya." Hlm. 15-17 dalam *Bunga Rampai Perjalanan Transmigrasi Rasau Jaya*, disunting oleh Misniarti. Pontianak: Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Tanjungpura.
- Oktafiani, Irin, dan Herry Yogaswara. 2020. "Transmigration Program Can Be Failed, but Transmigrant Stay Life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua." *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 5(2):200-20.
- Prihatin, Rohani Budi. 2013. "Revitalisasi Program Transmigrasi." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 4(1):57-64.
- Pusat Data dan Analisa TEMPO. 1974. *Transmigrasi-Mengubah Wajah Indonesia-Seri II*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Rahardjo, Murwatie. 1979. "Meningkatkan Transmigrasi sebagai Usaha Memberantas atau Mengurangi Kemiskinan." *Analisis CSIS* 7:607-23.
- Salim, M. Nazir. 2019. "Transmigrasi dan Hak Kewarganegaraan Agraria." Hlm. 84-107 dalam *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*, disunting oleh Moh. Nizar dan Fuad Abdulhani. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Septiyani. 2014. "Para Transmigran di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Tahun 1971-1979." *Journal of Indonesian History* 3(1):10-4.
- Tampubolon, Budiman, Diah Trismi Harjanti, Nur Meily Adlika, dan Ludovicus Manditya Hari Christanto. 2020. "Pemanfaatan Lahan Gambut Menjadi Lahan Potensial untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat." *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 4(2):182-91.
- Tim Publikasi Kecamatan Rasau Jaya. 2020. "Tentang Rasau." Diunduh 23 Agustus, 2022. (<https://rasaujaya.kuburaya.go.id>).
- Tirtosudarmo, Riwanto. 1999. "The Indonesian State's Response to Migration." *SOJOURN* 14(1):212-28.

Tobing, Maruli. 1982a. "Permukiman Transmigrasi di Rasau Jaya: Berkisar pada Masalah Tanah, Pasar dan Nilai Budaya." *Kompas*, Juni, 26.

_____. 1982b. "Permukiman Transmigrasi di Rasau Jaya: Semua Salah Urus dan Salah Tata Cara Hidup." *Kompas*, Juni, 25.

Wawancara. Bejo. Rasau Jaya, 19 Juli 2022.

Wawancara. Sopiah. Rasau Jaya, 16 Juli 2022.

Yudohusodo, Siswono. 1998. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.

